

ABSTRAK

Penggabungan bank BUMN syariah, yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) akan menjadikannya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, meskipun demikian penggabungan ini menyebabkan terdilusnya saham pemegang saham minoritas.

Penulisan hukum ini dirumuskan dengan bagaimana proses penggabungan (merger) yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dan Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas dalam penggabungan (merger) oleh Bank Syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka, kemudian dikumpulkan dengan metode studi pustaka, dan data-data tersebut dianalisa dengan metode analisis data kualitatif yang hasilnya berupa penyajian data dalam bentuk skripsi

Dalam peneilitian ini ditemukan bahwa proses merger yang dilakukan oleh BSI mengikuti ketentuan UUPT. Tahap awal melibatkan direksi masing-masing bank yaitu untuk membuat rancangan penggabungan. Selanjutnya, dilakukan *vote* oleh RUPS masing-masing bank untuk menyetujui rancangan penggabungan. Sebelum bank-bank secara resmi bergabung, tahapan terakhir adalah menyebarluaskan berita tentang penggabungan melalui surat kabar. Penggabungan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham minoritas, di mana saham mereka terdilusi sebesar 15%. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT mengenai *appraisal rights*.

Kata Kunci : Merger, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas

ABSTRACT

The merger of state-owned Islamic banks, namely BRIS, BSM, and BNIS, will make it the largest Islamic bank in Indonesia. However, this merger has resulted in the dilution of minority shareholders' shares.

The legal writing is formulated to address the issue of how the merger process carried out by Bank Syariah Indonesia (BSI) is conducted and what forms of legal protection exist for minority shareholders who are adversely affected by the merger conducted by BSI. The research method used in this legal writing is a normative juridical approach, with a descriptive-analytical research specification. This research utilizes secondary data obtained from library materials, which are collected through a literature review method. The data is then analyzed using qualitative data analysis methods, resulting in the presentation of data in the form of a thesis.

The results of this research indicate that the merger process carried out by BSI follows the provisions of the Law on Limited Liability Companies. The initial stage involves the preparation of a merger proposal by the directors of each bank that will participate in the merger. Subsequently, a voting stage is conducted by the General Meeting of Shareholders (RUPS) of each bank to approve the merger proposal. The final stage before the bank officially merges is to disseminate the merger news through newspapers. The merger conducted by BSI has caused losses for minority shareholders, specifically a dilution of shares by 15%. To address this issue, legal protection for minority shareholders is required, as regulated in the Law on Limited Liability Companies concerning appraisal rights.

Keywords : Merger, Legal Protection, Minority Shareholders